

BAB II

PENDIDIKAN KEBANGSAAN

A. Pengertian Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan kebangsaan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan bangsa. Bangsa Indonesia untuk menggapai masa depan yang gemilang harus menekankan pembangunan mental dan spiritual. Pembentukan manusia seutuhnya meliputi pembinaan di segala bidang akan berhasil manakala disertai dengan sistem pendidikan yang berbasis nilai filosofis kebangsaan. Jati diri dan kepribadian bangsa perlu dibentuk dengan pendidikan berbasis multikultural. Bangsa Indonesia terdapat beragam suku, agama, kepercayaan dan adat istiadat. Komunitas inklusif di Indonesia harus berkembang sesuai dengan semangat toleransi terhadap bentuk keragaman. Berpijak pada fakta historis, sosiologis, dan teologis yang ada di Indonesia maka semua lembaga pendidikan diharapkan tetap bereferensi pada nilai multikulturalisme. Optimisme semakin menggumpal di dada bahwa dengan pendidikan berbasis kebangsaan ini, bangsa dapat kokoh dengan eksistensinya di era sekarang (Anshoriy, 2008: ix-x).

Menurut Nasruddin Anshoriy (2008: 11) Pendidikan kebangsaan adalah upaya mencerdaskan pikiran, menghaluskan budi pekerti, memperluas

cakrawala pengetahuan serta memimpin dan membiasakan anak-anak menuju kearah kesehatan badan dan kesehatan ruhani bangsa.

Menurut Suwarno (1992: 104) pendidikan kebangsaan adalah pengajaran untuk membentuk manusia yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengajarkan cinta negara, cinta bangsa, cinta tanah air (patriotisme) yang hakekatnya manusia sebagai *zon politicon*, makhluk yang sadar politik, sadar sebagai warga dari suatu negara.

Tujuan pendidikan kebangsaan adalah untuk menjadikan atau membentuk anak didik agar bersifat nasionalis (yakni mempunyai rasa cinta tanah air karena menyadari bangsa Indonesia beraneka ragam suku, budaya, sehingga dengan melalui pendidikan diharapkan agar mampu mempertebal semangat kebangsaan tersebut) yang berjiwa besar dan penuh kepercayaan terhadap diri sendiri (Amin, 1995: 50).

Fungsi pendidikan kebangsaan adalah membentuk manusia muslim yang sejati yang berbudi luhur, cakap serta bertanggung jawab akan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan nusa dan bangsa hingga menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam (Priyono, 1958: 176).

Ruang lingkup pendidikan kebangsaan adalah terfokus pada cinta tanah air (cinta kemerdekaan), memiliki rasa kebangsaan; keberanian dan kemandirian (Noer, 1982: 115).

B. Menanamkan Cita-Cita Kemerdekaan

Bung Karno sebagai murid Cokroaminoto banyak menulis dan berpidato untuk memberi semangat bangsa. Ada dua diantaranya yang sangat

monumental, yaitu pidato pembelaan Bung Karno di pengadilan Hindia Belanda, pada Tahun 1930, dengan tema Indonesia menggugat dan Pidato lahir Pancasila pada tanggal 1 Juli 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Meskipun penyampaian antara pidato tersebut berselang 15 tahun, namun arus utama kebangsaan yang menjadi roh dari dua pidato itu sangatlah jelas. Pidato Indonesia menggugat adalah perlawanan terhadap Kolonial dan pernyataan perlunya membangun negara merdeka untuk Bangsa Indonesia. Sementara pidato lahirnya pancasila merupakan pidato kontribusi gagasan untuk meletakkan dasar dan idiologi kebangsaan bagi negara Indonesia merdeka yang diperjuangkan itu.

Secara garis besar, ada dua persoalan pokok yang digugat Bung Karno demi kepentingan bangsa Indonesia, yakni imperialisme (kolonialisme) dan kapitalisme. Ia berbicara secara umum bahwa imperialisme dan kolonialisme membawa dampak buruk bagi segenap bangsa-bangsa terjajah di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Karena itu dalam pembelaannya, ia menyampaikan pemikiran-pemikiran dan cita-cita pemikiran kebangsaan. Bagi Bung Karno, tiada bangsa terjajah rela dijajah terus menerus. Bung Karno menegaskan dalam pidatonya:³

“Tiap-tiap rakyat jajahan ingin merdeka!

Oleh karena itulah, tuan-tuan Hakim, maka tidak ada suatu rakyat negeri jajahan yang tidak ingin merdeka, tidak ada satu rakyat jajahan yang tak mengharap-harapkan datangnya hari kebebasan. Jikalau Partai Nasional Indonesia mendengung-dengungkan semboyan mencapai kekuasaan politik itu, jika Partai Nasional Indonesia

³ Lihat pidato Bung Karno di dalam buku *Pancasila 1 Juni dan Syari'at Islam*, karangan Hamka Haq (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2011), h. 58

mengobar-ngobarkan semangat ingin merdeka itu, maka ia hanya mengobar-ngobarkan cita-cita umum belaka. Kemerdekaan adalah syarat yang sangat penting baginya untuk bisa melawan dan memperhentikan imperialisme itu dengan seluas-luasnya. Kemerdekaan adalah syarat yang amat penting bagi perbaikan kembali segala susunan pergaulan hidup suatu bekas jajahan, suatu syarat yang amat penting bagi rekonstruksi nasionalnya. Ya, Kemerdekaan adalah syarat yang amat penting bagi kesempurnaan rumah tangga hingga tiap-tiap negeri, tiap-tiap bangsa, baik bangsa timur maupun bangsa barat, baik bangsa kulit berwarna maupun bangsa kulit putih. Tiada suatu bangsa dapat mencapai kebesaran sonder kemerdekaan nasional, tidak ada suatu negeri bisa jadi teguh dan kuasa, umpama ia tidak merdeka. Sebaliknya, tidak ada suatu negeri jajahan yang bisa mencapai keluhuran, tiada suatu negeri jajahan yang bisa mencapai kebesaran itu. Oleh karena itu, ingin supaya bisa mencapai kebesaran itu. Tiap-tiap rakyat yang tidak merdeka, tiap-tiap rakyat yang karena itu, tak bisa dan tak boleh mengatur rumah tangga sendiri secara kepentingan dan kebahagiaan sendiri, adalah hidup di dalam suasana yang rusuh, yakni hidup dalam suasana yang kami sebutkan tadi, hidup di dalam suasana *permanente on rust*, kerusuhan yang terus menerus yang disebabkan oleh tabrakan daya-daya yang saling bertentangan itu, suatu keadaan yang tidak boleh tidak menimbulkan pula keinginan keras akan hilangnya pertentangan-pertentangan itu. Yakni keinginan keras dan berhentinya ketidak merdekaan itu tadi, bukan saja dari mulut rakyat yang baru saja merasakan dari pengaruh imperialisme, tetapi juga dari mulut bangsa-bangsa yang sudah berabad-abad tak dapat menerima cahaya matahari kesabaran”(Haq, 2011: 60).

Bung Karno dalam mengungkapkan pikiran dan cita-cita untuk memerdekakan bangsa Indonesia, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia. Karena itu ia tidak puas dengan hanya mengutip pandangan sejumlah tokoh kebangsaan dan pejuang kemerdekaan tetapi ia juga mengutip tokoh bangsa lain. Selain itu pembenaran universal atas sikapnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Bung Karno mengutip pandangan Mustofa Kamil dari Mesir bahwa suatu bangsa yang tak merdeka sebenarnya adalah suatu bangsa yang tak hidup. Patrick Henry dulu berteriak berikanlah kepadaku kemerdekaan, atau

berikanlah kepadaku maut saja. Maka menurut Bung Karno, semua itu bukanlah jerit budi pekerti yang panas belaka, tetapi di dalam hakekatnya mereka mengutamakan kemerdekaan nasional (Haq, 2011: 60).

Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia berkobar di Nusantara karena dilatar belakangi dengan penindasan Belanda terhadap warga peri bumi. Belanda mulanya datang ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Sambil berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Belanda berhasil memperkuat penetralisasinya di Nusantara; Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan dengan bangsa Indonesia, melainkan satu demi satu berhasil ditundukkan, penguasa-penguasa lokal, kemudian merampas daerah-daerah tersebut ke dalam kekuasaannya, selanjutnya berlangsunglah sistem penjajahan (Asrohah, 1999: 146).

Belanda dicatat oleh sejarah banyak mewarnai perjalanan sejarah di Indonesia. Sejumlah peristiwa dan pengalaman dapat dicatat sejak awal kedatangannya di Indonesia, baik sebagai pedagang perorangan, yang kemudian diorganisasikan dalam bentuk kongsi dagang yang bernama VOC, maupun sebagai aparat pemerintah yang berkuasa dan menjajah. Oleh sebab itu wajar bila kehadiran mereka selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari penduduk pribumi, raja-raja dan tokoh agama setempat. Mereka menyadari, bahwa untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, harus berusaha memahami dan mengerti tentang seluk beluk penduduk pribumi yang dikuasainya. Mereka pun tahu bahwa penduduk yang dijajahnya itu mayoritas beragama Islam (Hasbullah, 1995: 48).

Bangsa barat datang ke Indonesia di satu pihak memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi tersebut bukan untuk

dinikmati penduduk pribumi, melainkan untuk meningkatkan hasil dari penjajahannya. Begitu pula dengan pendidikan, mereka telah memperkenalkan sistem dan metodologi baru yang tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan bayaran yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Bangsa Belanda pada kenyataannya sebagai penjajah benar-benar mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan memeras tenaga, sumber alam dan sebagainya, sementara dipihak lain juga mengadakan semacam pembodohan terhadap penduduk pribumi. Belanda sebagai penjajah berbeda sekali dengan penjajah yang lain, seperti Inggris, yang meskipun sebagai penjajah tetapi tidak mengesampingkan kemajuan pribumi terutama dibidang pendidikan. Hal ini bisa dilihat di beberapa negara bekas jajahan Inggris, seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong, yang sekarang negara tersebut masuk dalam kategori negara maju (Hasbullah, 1995: 49).

Dua motif yang telah mewarnai kebijakan penjajah Barat (Belanda) di Indonesia kurang lebih selama 3,5 abad, yaitu westernisasi dan kristenisasi yang sama untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Di samping itu sebagai bangsa penjajah, pada umumnya mereka menganut pikiran Machiavelli yang antara lain menyatakan:

- a. Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah;
- b. Agama tersebut dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat;
- c. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawa untuk memecah belah dan agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah;
- d. Janji dengan rakyat tak perlu ditepati jika merugikan, dan
- e. Tujuan dapat menghalalkan segala cara (Zuhairini, 1997: 147).

HOS. Cokroaminoto menggambarkan bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas umatnya Islam memandang orang-orang Barat tersebut sebagai penjajah, tidak peduli mereka katolik atau protestan. Dalam dada penjajah tersebut begitu kuat ajaran politikus curang dan licik (Zuhri, 1978: 532).

Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Zoan Coen menduduki Jakarta. Belanda kemudian memperluas jajahannya dengan menjatuhkan penguasa di daerah-daerah. Misalnya, setelah berhasil memecah belah kerajaan Mataram, setelah wafatnya Sultan Agung. Belanda lalu memberlakukan kolonialisme atas seluruh kekuasaan Mataram. Sulawesi Selatan jatuh ke dalam penjajahan Belanda sekitar tahun 1667 setelah perjanjian Bongaya. Cirebon ditumbangkan oleh Belanda pada tahun 1705, sedang Banten dimasukkan dalam stuktur administrasi Belanda pada 1813, meski Sultan masih diakui, ia hanya menjadi figur pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Apa yang terjadi di Jawa juga terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Tahap demi tahap kekuasaan di Sumatera dan Kalimantan masuk ke dalam penjajahan Belanda (Asrohah, 1999: 150).

Belanda secara politik sudah menguasai Indonesia. Raja-raja di daerah kekuasaannya sangat terbatas atau tidak berkuasa penuh, baik dari segi wilayah maupun di bidang ketatanegaraannya. Belanda menguasai politik, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya di Indonesia. Belanda berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama yang mereka sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang sebagai kaum imperalis dan kolonialis, yaitu kebarat-baratan (westernisasi) dan bermisi kristenisasi.

Belanda datang di Jawa tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Penetralisasi Belanda menghancurkan elemen-elemen kehidupan perdagangan

orang Jawa, kegiatan umat Islam dalam politik. Berikutnya, segala aktifitas umat Islam yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama Islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang, ibadah haji dibatasi dan setiap jamaah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh luar yang dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Belanda (Asrohah, 1999: 151).

Belanda dalam mengatur pendidikan dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri, terutama untuk kepentingan agama Kristen. Ketika Van Den Bos menjadi Gubernur Jendral di Jakarta pada tahun 1831, misalnya keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan menjadi satu. Di setiap daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.

Lembaga pendidikan diperuntukkan bagi penduduk pribumi adalah ketika Van Den Capellen menjabat sebagai Gubernur Jendral yaitu memberikan surat edaran yang ditunjukkan kepada Bupati yang isinya: “Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat mentaati undang-undang dan hukum negara yang ditetapkan Belanda (Zuhairini, 1997: 148).

Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk kalangan pribumi, tetapi semuanya adalah demi kepentingan Belanda. Jiwa dari surat edaran yang dibuat oleh Van Den Capellen di atas menggambarkan tujuan dari didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Sedang pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, mushola, dan lainnya, dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Serta pemerintah Belanda tidak mengakui para lulusan

pendidikan tradisional karena mereka tidak bisa bekerja baik di pabrik maupun sebagai tenaga birokrat.

Isi surat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial sangat mengesampingkan sistem pendidikan Islam tradisional. Mereka yang belajar di lembaga pendidikan Islam tradisional dianggap buta huruf karena tidak bisa membaca huruf latin yang menimbulkan kecurigaan dan anggapan negatif dari pemerintah kolonial bahwa mereka cenderung membangkang kepada kolonial Belanda karena tidak mampu memahami undang-undang dan hukum negara.

Politik yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan dan rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Belanda menerapkan berbagai peraturan yaitu:

- a. Pemerintah Belanda pada tahun 1882 membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *priesterraden*. Dari nasehat badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajaran agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda.
- b. Pemerintah Belanda pada tahun 1925 mengeluarkan lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.
- c. Pemerintah Belanda pada tahun 1932 mengeluarkan lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonansi sekolah liar (*wilde school ordonatie*) (Hasbullah, 1995: 52).

Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda terhadap umat Islam di Indonesia di atas yang begitu ketat dan keras mengadakan pengawasan, tekanan, dan pemberantasan terhadap aktifitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia tersebut, terkesan bahwa dalam tempo yang tidak begitu lama pendidikan Islam akan menjadi lumpuh dan porak poranda. Namun, kenyataan berbicara lain bahwa apa yang dapat disaksikan dalam sejarah justru adalah keadaan yang sebaliknya, Islam malah bangkit.

Ridwan Saidi mengutip ungkapan dari Wertheim, bahwa apa pun politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non-Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaan tersebut (Hasbullah, 1995: 52).

Belanda melancarkan tekanan-tekanan kepada bangsa Indonesia sama sekali tidak menggoyahkan semangat perjuangan untuk merdeka. Jiwa kebangsaan tetap terpelihara dengan baik. Para ulama dan kyai bersikap *non cooperative* terhadap Belanda dalam rangka menanamkan cita-cita kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sedang semangat kemerdekaan itu sendiri tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya.

C. Membangkitkan Rasa Kebangsaan

Bung Karno pada banyak kesempatan menyampaikan bahwa: “Tiap-tiap perjuangan mesti dimulai dengan *nationale well* (keinginan nasional) baru kemudian *national geist* (spirit nasional) baru kemudian *national daad* (tindakan nasional)”. Bertolak dari sini, Bung Karno bertekad membangkitkan rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia, sebab tanpa rasa kebangsaan dan persatuan nasional, mustahil bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan keluar dari kesengsaraan. Sesungguhnya inilah inti pemikiran kebangsaan yang dianut Bung Karno, yaitu persatuan Indonesia sebagai bangsa untuk

melawan kolonialis dan kapitalis, menuju kesejahteraan bangsa. Bung Karno yakin hanya dengan persatuan kebangsaanlah semua rakyat yang mendiami tanah air dari Sabang sampai Merauke akan mampu berjuang melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Perjuangan yang dibangun secara primordial suku dan golongan tidak akan mampu melawan politik *divide et impera* yang telah diterapkan kolonial Belanda selama beratus-ratus tahun di bumi Indonesia.

Filosofinya, Bung Karno membentuk partai berdasarkan kebangsaan, yaitu Partai Nasional Indonesia, tiada lain maksudnya adalah untuk mempersatukan semua potensi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maerauke, dengan segala keragaman suku, budaya dan agama, untuk berjuang merebut kemerdekaan. Ia melakukannya demi kepentingan semua elemen bangsa tanpa kecuali, dan karena itu ia tidak akan berjuang eksklusif yang membuat satu orang atau satu golongan dari bangsa ini merasa ketinggalan.

Bagi Bung Karno, perjuangan kemerdekaan yang dapat memayungi merangkul dan mempersatukan segenap elemen bangsa itu, hanya dapat dilakukan jika di gerakkan secara nasionalis. Langkah awal memajukan cita-cita tersebut, Ia membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Perjuangan yang dilancarkan dengan partai tersebut, dipandang oleh Belanda sebagai ancaman yang sangat berbahaya terhadap kepentingan kolonialnya. Belanda pun menangkap Bung Karno, dan mengajukan kepengadilan dengan tuduhan melakukan provokasi dan penghasutan yang dapat mengacaukan kehidupan masyarakat. Padahal, yang dilakukan Bung Karno bukan penghasutan, melainkan upaya membangkitkan rasa kebangsaan masyarakat Indonesia

menuju kemerdekaannya, yang ia sebut sebagai nasionalisme positif, bukan *nasionalisme chauvinistis* (Haq, 2011: 63).

Bagi Bung Karno, nasionalisme positif merupakan semangat rakyat di bagian dunia manapun, yaitu semangat rakyat yang di selenggarakan oleh suatu keadaan, terutama oleh penjajahan. Mereka memiliki semangat ingin merdeka dikalangan bangsa Indonesia. Semangat kemerdekaan disini bukanlah seperti semangat kaum buruh yang melawan kaum borjuis di negara-negara industri. Melainkan semangat kebangsaan yang ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Sebab, kata Bung Karno:

“Tiap-tiap rakyat yang dikuasai bangsa lain, tiap-tiap rakyat jajahan, tiap-tiap rakyat yang saban hari saban jam merasakan imperialisme bangsa lain, tiap-tiap rakyat yang diperintahi secara jajahan. Partai Nasional Indonesia mengerti akan hal ini, PNI mengerti bahwa di dalam kesadaran nasionalisme inilah letaknya daya, yang nanti bisa membukakan kenikmatan hari kemudian. PNI oleh karenanya, menyubur-nyuburkan dan memelihara nasionalisme itu, dari nasionalisme yang kurang hidup dibikin jadi nasionalisme yang hidup, dari nasionalisme yang instinktif jadi nasionalisme yang sadar, dari nasionalisme yang statis jadi nasionalisme yang dinamis, pendek kata dari nasionalisme yang negatif menjadi nasionalisme yang positif ” (Haq, 2011: 63).

Bung Karno menjelaskan makna yang sesungguhnya dari nasionalisme yang diperjuangkannya, yaitu nasionalisme kemanusiaan yang ingin membangun bangsa sendiri untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme seperti ini sama sekali bukanlah nasionalisme *chauvinistis* yang benci kepada bangsa lain.

Bung Karno dengan nasionalisme positifnya bermaksud mengantarkan bangsa Indonesia ke masa depan yang cerah yang terang benderang, atau seperti katanya:

“Seperti fajar yang berseri-seri dan terang penuh dengan pengharapan-pengharapan yang menghidupkan. Tidaklah lagi hari kemudian itu dipandang olehnya sebagai malam yang gelap gulita, tidaklah lagi hatinya penuh dengan syak dan dendam belaka, dengan nasionalisme yang demikian itu rakyat kami akan ridho dan suka hati menjalankan segala pengorbanan untuk membeli hari kemudian yang indah yang menimbulkan hasrat itu. Pendek kata, dengan nasionalisme yang demikian itu rakyat kami akan bernyawa, akan hidup, dan tidak laksana bangkai sebagai karang” oleh karena rasa kebangsaanlah Bung Karno mengutip pemimpin Mesir yang termasyhur Mustafa Kamil, menggambarkan nasionalisme positif itu, maka bangsa-bangsa yang terbelakang lekas mencapai peradaban, yang mengalir dalam urutan bangsa-bangsa yang kuat dan rasa kebangsaanlah yang memberi hidup kepada tiap-tiap manusia yang hidup.”⁴

Bung Karno mempertegas bahwa tanpa nasionalisme tiada kemajuan, tanpa nasionalisme tiada bangsa, seperti kata Sun Yat Sen yang dikutipnya:

“Nasionalisme adalah milik yang berharga yang memberi kepada suatu negara tenaga untuk mengejar kemajuan dan memberi kepada sesuatu bangsa tenaga untuk mempertahankan hidupnya.”⁵

Rasa kebangsaan itu tertanam di jiwa bangsa Indonesia karena kekejaman kolonial Belanda, rakyat Indonesia terbelenggu dalam kemunduran dan keterbelakangan karena kebebasan untuk beragama dan maju harus berhadapan dengan ketatnya peraturan dan pengawasan pemerintah kolonial.

⁴ Bung Karno mengutip dalam buku Lothrop Stodord, *The New World Of Islam*, h 151, sesuai dalam buku *Pancasila 1 Juni dan Syarekat Islam*, h. 65

⁵ Bung Karno mengutip Sun Yat Sen dalam bukunya *San Min Chu I* (telah ada terjemahan bahasa Indonesia), sesuai dalam buku *Pancasila 1 Juni dan Syari'at Islam*, h. 65

Belanda dengan masa keemasannya di Indonesia hilang lenyap sekaligus, ketika pada tanggal 8 Maret 1942 mereka bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang. Kendati demikian, Bangsa Indonesia belum bebas dari penjajahan sebab Jepang mengambil alih bangsa Indonesia dari Belanda. Selanjutnya, Bangsa Indonesia memasuki alam baru di bawah pemerintahan Jepang.

Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam perang dunia ke II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru (Zuhairini, 1997: 151).

Pada awalnya, pemerintah Jepang mengambil siasat merangkul umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Jepang mendekati dan mengambil hati bangsa Indonesia, mereka akan dapat memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Untuk itu Jepang menempuh kebijakan, antara lain:

- a. Kantor Urusan Agama pada zaman Belanda disebut Kantor *For Islamic Tiche Saken* yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam, yaitu KH. Hasyim Asyari, sedangkan di daerah-daerah dibentuk Sumuka.
- b. Pesantren besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
- c. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran Islam.
- d. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dan kemiliteran bagi pemuda Islam, yang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin.

- e. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta.
- f. Jepang bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin nasional dan ulama Islam diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA).
- g. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan.

Jepang berupaya menerapkan kebijakan tersebut di atas adalah supaya kekuatan bangsa Indonesia dapat dibina untuk kepentingan Perang Asia Raya yang dipimpin oleh Jepang.

Jepang setelah memasuki Perang Dunia II dan kedudukan Jepang terjepit oleh Sekutu, Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap Bangsa Indonesia. Hasil kekayaan bumi Indonesia dikuras untuk pembiayaan Perang Asia Timur Raya. Jepang lalu memberlakukan Kerja Paksa (Romusha). Kemudian Jepang membentuk badan-badan pertahanan rakyat semesta, seperti Haihoo, PETA, dan Keibodan, sehingga penderitaan rakyat lahir dan batin makin tak tertahankan lagi. Maka timbullah pemberontakan-pemberontakan, baik dari Golongan PETA di Blitar Jawa Timur dan lain-lain, maupun oposisi dari para alim ulama. Di samping itu banyak kyai yang ditangkap oleh Jepang yang kemudian dipenjarakan (Hasbullah, 1995: 51).

Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-murid sekolah tiap hari hanya disuruh gerak jalan, baris berbaris, bekerja bakti (Romusha), bernyanyi dan lainnya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan lancar (Zuhairini, 1997: 152).

Bangsa Indonesia bersikap atas penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh Jepang semakin bulat untuk melakukan berbagai bentuk

perlawanan, sehingga pemerintah Jepang mengalami kuwalahan dalam menghadapi pemberontakan yang terjadi di mana-mana di seluruh tanah air. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk memanfaatkan peluang emas, mengingat posisi Jepang yang semakin terjepit. Akhirnya, pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas menuju Indonesia menjadi negara merdeka.

D. Membangun Kembali Masa Kejayaan Bangsa

Untuk membangkitkan nasionalisme tidak cukup hanya persatuan saja, tetapi harus dilandasi dengan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai tokoh bangsa Bung Karno banyak menyinggung harga diri (martabat) bangsa Indonesia yang harus dibangun melawan penghinaan yang dilakukan oleh Belanda. Rakyat Indonesia tidak berdaya dan tidak berdaulat atau tidak mempunyai kekuasaan apapun atas dirinya sendiri, bahkan martabatnya sebagai manusia dipandang rendah di bawah kekuasaan dan keadidayaan kolonial Belanda. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah jaya dimasa lalu, punya masa keemasan di era Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Bangsa Indonesia harus didorong untuk bangkit menggapai masa kejayaan di masa mendatang, melewati hari yang amat buruk di era penjajahan. Bung Karno tanpa henti-hentinya membangkitkan kebangsaan itu; membangkitkan nasionalisme dari dulu, sekarang dan hari kemudian (Haq, 2011: 66).

Bung Karno menyampaikan upaya untuk membangkitkan kebanggaan nasionalisme itu, harus menempuh tiga jalan yaitu: pertama, menunjukkan kepada rakyat bahwa ia punya hari dulu, adalah hari dulu yang indah. Kedua,

menambah keinsyafan rakyat, bahwa ia punya hari sekarang, adalah hari sekarang yang gelap, dan ketiga, memperlihatkan kepada rakyat sinarnya hari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji itu.

Tiga jalan tersebut yang disebutnya sebagai tri murti dikemukakan Bung Karno di depan pengadilan Hindia Belanda di Bandung. Bahwa bangsa Indonesia punya hari dulu yang indah, punya masa silam gemilang! Kata Bung Karno di depan pengadilan itu:

“Tuan-tuan Hakim, siapakah orang Indonesia yang tidak mengeluh hatinya, kalau mendengarkan tentang keindahan itu, siapakah yang tidak menyesalkan hilangnya kebesaran-kebesarannya! Siapakah orang Indonesia yang tidak hidup semangat nasionalnya, kalau mendengarkan riwayat tentang kebesaran kerajaan Melayu dan Sriwijaya, tentang kebesaran Mataram yang pertama, kebesaran zaman Sindok dan Erlangga dan Kediri dan Singosari dan Majapahit dan Pajajaran, kebesaran pula dari Bintara, Banten dan Mataram kedua di bawah Sultan Agung. Siapakah orang Indonesia yang tidak mengeluh hatinya kalau ia ingat akan benderanya yang dulu ditemukan dan dihormati orang sampai Madagaskar dan di Persia dan Tiongkok. Tetapi sebaliknya, siapakah tidak hidup harapannya dan kepercayaannya, bahwa rakyat yang demikian kebesarannya hari dulu itu pasti cukup kekuatan untuk mendatangkan hari kemudian yang indah pula, pasti masih juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan menaik lagi di atas tingkat kebesaran di kelak kemudian hari? Siapakah yang tidak seolah-olah mendapat nyawa baru dari tenaga baru, kalau dia membaca riwayat zaman dulu itu? Begitu pula rakyat, dengan mengetahui kebesaran hari dulu itu, lantas hiduplah rasa nasionalnya, lantas menyala lagilah api harapan di dalam hatinya, dan lantas mendapat lagilah rakyat itu nyawa baru dan tenaga baru” (Haq, 2011: 63).

Mengenang masa lalu, zaman penjajahan yang feodal itu, bukan berarti Bung Karno ingin melestarikan feodalisme. Sebab menurut keyakinannya, feodalisme masa lalu merupakan bagian dari dinamika sejarah bangsa

Indonesia, yang pada gilirannya akan berubah secara evolusi menuju ke zaman modern yang demokratis.

E. Melawan Imperialisme dan Kolonialisme

Kebanggaan akan kejayaan bangsa di masa lalu juga tidak cukup untuk sebuah kebangkitan nasionalisme, tanpa cita-cita membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu bangsa Indonesia harus menyadari keadaannya yang sedang dalam kesengsaraan di bawah kolonial Belanda. Keadaan bangsa demikian, menurut Bung Karno membawa rakyat Indonesia menjadi kromo atau marhaen, harus diubah menjadi rakyat yang sejahtera. Kuncinya adalah kemerdekaan, sebab Belanda tidak hanya merupakan imperialis yang membudak bangsa Indonesia tetapi juga bertindak sebagai pelaku ekonomi yang kapitalis yang membudak bangsa Indonesia sebagai sapi perahan. Semua kekayaan negeri dibawa dan diangkut ke negeri Belanda guna kesejahteraan bangsa Belanda sendiri. Kolonialis menjadi makmur diatas penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia.

Dalam perlawanan terhadap buruknya dampak sistem kapitalis yang di terapkan Belanda di Indonesia, Bung Karno menyaksikannya betapa rakyat Indonesia semakin menjadi miskin, usaha rumah tangga semakin tidak berdaya, pengusaha bumiputera semakin kecil, tak dapat menjadi besar di bawah sistem kapitalis Belanda itu. Apa yang disaksikan Bung Karno ketika itu rasa-rasanya semakin aktual jika kita membandingkan keadaan perekonomian bangsa dan negara kita sekarang, yang disana-sini juga diberlakukan, sengaja atau tidak sistem kapitalis itu masih ada.

Akibat kapitalis, dari zaman ke zaman, bangsa Indonesia menjadi kaum kromoisme. Dari sinilah, gagasan marhaenisme menjadi penting, sebagai gagasan yang bercita-cita mensejahterakan rakyat kecil, kaum Marhaen itu bagi Bung Karno, kesejahteraan rakyat dapat tercapai hanya jika penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan di bumi Nusantara, sebab penjajahan itulah yang sebenarnya menyebabkan sebagian rakyat menjadi Marhaen, menjadi kromo. Maka tidak salah jika Bung Karno menyebut Belanda sebagai pihak yang bertanggungjawab telah menciptakan sendiri lahirnya kaum Marhaen.

Bung Karno tidak puas jika hanya berteori sendiri seperti yang diungkapkan diatas, sehingga ia pun merasa perlu mengutip pandangan-pandangan pemikir dari Barat. Dalam pidato pembelaannya, ia mengaku tak dapat meninggalkan pandangan antara lain dari Raffles, ataupun Prof. Veth, yang semuanya membuktikan kebenaran sikap kritis Bung Karno. Kutipan itu sebagai berikut:

“Di dalam buku Raffles yang termasyhur tentang tanah jawa, kami membaca tentang imperialisme tua yaitu begitu sukarnya menggambarkan dengan panjang lebar luasnya pandangan di tanah Jawa di saat orang Belanda mulai berdiam di laut-laut Timur, begitu pula menyedihkan hati membuktikan dengan cara bagaimana pandangan itu oleh perbuatan bangsa asing dihalang-halangi, di ubah sama sekali dikecil-kecilkan, oleh kekuasaan monopoli yang bobrok, oleh ketamakan dan keserakahan akan duit yang dibarengi kekuasaan dan kedlaliman yang picik dari suatu pemerintah saudagar.”

“Demikian pasal-pasal yang terpenting dari tiga puluh satu pasal mengenai pembatasan, yang membelenggu tiap gerak perdagangan dan memadamkan bara yang penghabisan dari semangat berusaha, untuk

memuaskan dari pandangan-pandangan picik angkara murka, yang bisa di sebut kefanatikan akan keserakahan kepada harta.”⁶

“Tuan-tuan Hakim, Reffles adalah terkenal sebagai pembenci bangsa Belanda! karena itu, marilah kita menyelidiki pendapat pujangga-pujangga Belanda sendiri dan kita akan mendengar pendapat yang tidak berbeda,. Tidakkah Prof. Veth tentang imperialisme tua itu mengatakan:

“Masih dalam abad ke-16, seperti juga zaman Majapahit, terutama terkenal sebagai kaum saudagar yang besar usaha, kaum pelaut yang gagah, kaum perantau yang berani, dan bahwa mereka pada umumnya telah harus mengalami perubahan yang besar untuk menjadi petani-petani yang diam dan damai seperti sekarang ini, dan bahwa nyata sekali bahwa semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai kutukutunya dan bahwa (mereka) tidak luput dari bekerjanya obat tidur penjahatan yang lama di bawah bangsa Asing yang lebih kuat.”⁷

Bung Karno tak henti-hentinya menekankan perlunya bangsa Indonesia memiliki semangat dan tenaga untuk merebut kemerdekaan, karena dengan itulah rakyat dapat berdaulat atas dirinya sendiri, tidak lagi menjadi budak bangsa Eropa. Kemudian diatas bangunan kekuasaan itu, bangsa Indonesia akan membangun perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, melepaskan diri dari kesengsaraan akibat kapitalisme dari zaman ke zaman. Untuk mencapai kemerdekaan itu, Bung Karno tidak bosan-bosannya menekankan perlunya kesadaran kebangsaan dan persatuan (Haq, 2011: 87).

⁶ Bung Karno mengutip Sir T.S. Raffles dalam buku *Geschiedenis Van Java*, terjemahan Van de Sturter 1836, h. 116, 140, sesuai dengan catatan kaki dalam buku *Pancasila 1 Juni dan Syari'at Islam*, h. 224

⁷ Veth dalam *Java I* h. 299 sebagai mana terdapat dalam catatan kaki pada buku *Pancasila 1 Juni dan Syari'at Islam*, h. 224

